

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenai analisis pengaruh rasio keuangan dan makro ekonomi terhadap penyaluran kredit UMKM pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk periode 2012-2021 adalah sebagai berikut:

1. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit UMKM pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Hal ini memberi arti bahwa modal yang dialokasikan ke kredit masih sedikit, karena modal tersebut digunakan untuk menjaga kewajiban penyediaan modal minimum dan mengantisipasi terjadinya risiko kerugian pada bank.
2. *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit UMKM pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Hal ini memberi arti bahwa *Non Performing Loan* (NPL) yang tinggi akan menyebabkan penyaluran kredit menjadi turun. Karena dalam kenyataannya, nilai *Non Performing Loan* (NPL) yang tinggi akan menyebabkan bank harus membentuk cadangan penghapusan yang lebih besar, sehingga dana yang dapat disalurkan lewat pemberian kredit juga akan berkurang.
3. Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit UMKM pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Hal ini memberi arti bahwa peningkatan atau penurunan Dana Pihak Ketiga (DPK) selama periode penelitian mempengaruhi penyaluran kredit UMKM secara signifikan. Semakin tinggi Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh perbankan, maka akan mendorong peningkatan jumlah kredit yang disalurkan.
4. Inflasi tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit UMKM pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Hal ini memberi arti bahwa pada saat inflasi naik, masyarakat akan lebih memilih untuk mengurangi konsumsi atau

memperketat pengeluaran, sehingga hal tersebut tidak berdampak pada kenaikan kredit yang disalurkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk.

5. Produk Domestik Bruto (PDB) tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit UMKM pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Hal ini memberi arti bahwa nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk pada umumnya adalah golongan menengah ke bawah yang dalam melakukan pinjaman kredit tidak terpengaruh oleh perubahan nilai Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi lebih dipengaruhi oleh keperluan-keperluan dan kebutuhan rumah tangga yang sifatnya mendadak atau mendesak.
6. Suku Bunga Bank Indonesia (*BI Rate*) berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit UMKM pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Hal ini memberi arti bahwa ketika ada kenaikan Suku Bunga Bank Indonesia (*BI Rate*) maka akan meningkatkan penyaluran kredit dan ketika ada penurunan pada Suku Bunga Bank Indonesia (*BI Rate*) maka akan menurunkan penyaluran kredit pada UMKM.
7. *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL), Dana Pihak Ketiga (DPK), Inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), Inflasi, dan Suku Bunga Bank Indonesia (*BI Rate*) secara simultan berpengaruh terhadap penyaluran kredit UMKM pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk.

5.2 Implikasi Manajerial

Berdasarkan kesimpulan di atas, implikasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. Tingginya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memberi arti bahwa adanya modal yang menganggur. Kondisi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang cukup tinggi jauh di atas ketentuan minimal yang disyaratkan oleh Bank Indonesia sebesar 8%, mengharuskan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk untuk lebih memperkuat permodalan bank,

kegiatan penyaluran kredit harus di tahan agar modal bank tidak semakin menipis. Modal juga dapat dimaksimalkan dengan melalui pendapatan laba ditahan.

2. Penurunan pada kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) bank akan meningkatkan profitabilitas pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Dengan kata lain, semakin tinggi *Non Performing Loan* (NPL) bank, maka laba perusahaan akan menurun, sehingga bank wajib mempertahankan kualitas kreditnya. Langkah antisipasi yang harus dilakukan untuk mencegah tingginya *Non Performing Loan* (NPL) adalah dengan meningkatkan ketelitian dalam tahap analisa kredit. Seringkali untuk meningkatkan ekspansi kreditnya bank lalai dalam tahap analisa kredit awal, sehingga kredit yang diberikan terlalu tinggi atau bahkan perusahaan yang tidak layak diberikan kredit. Analisa kredit ini tidak hanya diserahkan pada analisis kredit, tetapi pemutus kredit juga harus teliti memeriksa proyeksi yang dibuat oleh analisisnya. Begitu juga dalam tahap perpanjangan kredit dan lainnya. Selain itu, setelah penyaluran kreditpun, analisis harus memastikan bahwa kredit yang diberikan digunakan sesuai dengan peruntukannya, mengingat tingginya penyalahgunaan kredit saat ini.
3. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan faktor yang mendukung penyaluran kredit perbankan. Semakin besar Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun maka semakin besar pula jumlah kredit yang disalurkan. Oleh karena itu, PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk harus melakukan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara optimal. Hal ini dapat dilakukan antara lain melalui program *reward* yang menarik, penjualan dan pelayanan yang memenuhi syarat, suku bunga simpanan yang menarik, dan jaringan layanan yang luas dan mudah diakses, guna menarik minat masyarakat untuk menyimpan dananya. Di sisi lain, ketatnya persaingan dalam rangka penghimpunan dana (baik dengan sesama bank maupun dengan lembaga keuangan bukan bank) dan tuntutan sebagai entitas bisnis untuk meningkatkan perolehan laba, mendorong PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk untuk mempergunakan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun dengan optimal. Penyaluran kredit merupakan alokasi

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan, di samping sebagai bentuk tanggung jawab moral perbankan atas Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun dari masyarakat.

4. Untuk masa yang akan datang, pemerintah sebaiknya menjaga perubahan tingkat inflasi dalam menyalurkan kredit pada debitur, karena semakin tinggi tingkat inflasi maka kecenderungan kemampuan untuk membayar hutang bank dan bunga akan lebih rendah. Maka yang harus dilakukan bank adalah harus membatasi ketersediaan uang kas atau dapat juga dengan menaikkan nilai bunga, sehingga masyarakat dapat tertarik untuk menyimpan uangnya di bank tersebut.
5. Untuk masa yang akan datang, pemerintah diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan kredit dengan cara memberikan kemudahan bagi sektor perbankan dalam menjalankan dan mengelola dana yang ada untuk disalurkan kembali dalam bentuk kredit, atau dapat juga melalui kebijakan moneter yang dapat mendorong masyarakat agar mau berinvestasi untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan menggerakkan roda perekonomian di Indonesia.
6. Suku Bunga Bank Indonesia (*BI Rate*) merupakan alat kebijakan moneter, sehingga Bank Indonesia sebagai pihak yang mengatur suatu kebijakan dalam bank harus mengoptimalkan fungsi dari *BI Rate* itu sendiri. Walaupun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *BI Rate* memiliki pengaruh terhadap penyaluran kredit UMKM, namun pada kenyataannya perubahan suku bunga kredit perbankan tidak sebesar perubahan *BI Rate*. Walaupun jumlah kredit perbankan meningkat, namun suku bunga kredit yang ditawarkan masih tinggi. Maka yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah harus lebih mempertimbangkan lagi efek dari kebijakan yang akan dikeluarkan untuk jangka panjang, bukan hanya jangka pendek saja.